



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kelurahan Kasongan Lama  
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos : 74411  
Website : [bkad.katingankab.go.id](http://bkad.katingankab.go.id) Email [bkadkatingan@gmail.com](mailto:bkadkatingan@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 700.1.1/ 12 /BKAD-1/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024-2026**

**KEPALA BADAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melengkapi ketentuan dengan menambahkan definisi operasional dan menambah rumus pada formulasi dalam Indikator Kinerja Utama guna lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan IKU
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Katingan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024- 2026.

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan merupakan tolak ukur dan acuan dalam pencapaian kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh masing-masing kepala bidang dan disampaikan kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana disebutkan pada point kesatu diatas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

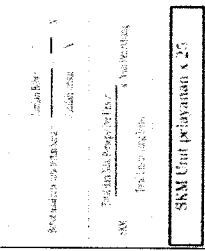
Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 3 Januari 2025

Kepala Badan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Katingan,



**Toto Jaya, S.Pi.**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19720229 200604 1 008

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKAD	Nilai SAKIP	Merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai Perencanaan + Nilai Pengukuran + Pelaporan + Evaluasi Internal 5	Nilai / Predikat 6	Sekretariat 7	Laporan Hasil Evaluasi APIP 8
	2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan di BKAD	Nilai IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan Kualitatif		Skor	Sekretariat	Laporan Hasil SKM
	3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	Persentase laporan keuangan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu dibagi jumlah keseluruhan Laporan Keuangan x 100%	Persen	Bidang Akuntansi/ Bidang Perbendaharaan	Laporan Pertanggung jawaban 39 OPD

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR : 700.1.1/ 12 /BKAD-1/2025  
TANGGAL : 3 Januari 2025  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PERANGKAT DAERAH PERIODE 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1 Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern	Hasil Evaluasi/ Opini BPK	Predikat	BKAD	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi jumlah laporan pengelolaan aset daerah x 100%	Persen	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Rekonsiliasi BMD 40 OPD
5	Peningkatan Efektifitas Penganggaran daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun Dokumen Anggaran Tepat Waktu dibagi jumlah OPD yang menyampaikan dokumen anggaran tepat waktu x 100%	Jumlah OPD yang Menyusun Dokumen Anggaran Tepat Waktu dibagi jumlah OPD yang menyampaikan dokumen anggaran tepat waktu x 100%	Persen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	KUA PPAS, RKA SKPD, APBD

Kepala Badan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Katingan,



Toto Jaya, S.Pi.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19720229 200604 1 008